

Peran Komite Sekolah dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ahmad Ansori¹, Salwa Riswanda Sinaga^{2*}, Hasanatul Jamilah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: *ahmadansori@uinjambi.ac.id*¹, *salwariswanda6@gmail.com*², *hasanatuljamilah1903@gmail.com*³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komite sekolah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan sumber data dari jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan media sosial. Subjek penelitian adalah komite sekolah, sedangkan objeknya adalah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian referensi teoretis sesuai tema penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai mitra sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana melalui penggalangan dana dari masyarakat, memberikan pertimbangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta turut aktif dalam proses pemeliharaan fasilitas sekolah. Selain itu, komite juga berperan dalam membangun partisipasi masyarakat dan menjembatani kebutuhan sekolah dengan pihak luar. Meskipun begitu, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kapasitas anggota komite, minimnya koordinasi dengan sekolah, serta keterbatasan anggaran. Untuk itu, diperlukan optimalisasi peran komite sekolah sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 serta pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Kata-Kata Kunci: Komite Sekolah; Penyediaan; Pemeliharaan; Sarana dan Prasarana

Abstract

This study aims to examine the role of the school committee in the provision and maintenance of educational facilities and infrastructure. The method used is a literature study with data sources from scientific journals, books, government regulations, and social media. The subject of the study is the school committee, while the object is the provision and maintenance of educational facilities and infrastructure. Data collection was carried out through theoretical reference searches according to the research theme, then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the school committee has a role as a school partner in the procurement of facilities and infrastructure through fundraising from the community, providing considerations in the procurement of goods and services, and actively participating in the process of maintaining school facilities. In addition, the committee also plays a role in building community participation and bridging the needs of schools with external parties. Even so, there are still obstacles such as lack of capacity of committee members, minimal coordination with schools, and budget constraints. For this reason, it is necessary to optimize the role of the school committee in accordance with the provisions of Law No. 20 of 2003 as well as coaching and training for its members so that they can carry out their functions more effectively.

Keywords: School Committee; Provision; Maintenance; Facilities and Infrastructure

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Menurut UNESCO, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, damai, serta berkelanjutan (Irayanti & Komalasari, 2023). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas pendidikan akan sulit dicapai secara optimal. Sarana pendidikan merujuk pada perlengkapan langsung yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, media audio visual, dan perangkat teknologi informasi. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang menunjang kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, halaman, sanitasi, listrik, air bersih, hingga jaringan internet. Keduanya memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah (Badrudin et al., 2024).

Menurut Suryosubroto, mutu suatu sekolah tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswanya, tetapi juga dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terpelihara dengan baik (Indrayeni, 2024). Ia menekankan bahwa lingkungan belajar yang layak dan kondusif akan meningkatkan semangat belajar siswa dan guru, serta memperkuat kultur akademik di sekolah. Dengan demikian, penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana harus menjadi prioritas dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks ini, komite sekolah hadir sebagai lembaga mandiri yang berperan sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut (Utama, 2020), komite sekolah harus menjadi *agent of development*, yaitu agen penggerak pembangunan sekolah yang mampu menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Komite sekolah tidak hanya bertindak sebagai wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam penyediaan fasilitas pendidikan ketika anggaran pemerintah belum mencukupi.

Peran komite sekolah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting, terlebih ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Komite sekolah dapat turut aktif dalam berbagai aspek, mulai dari penggalangan dana dari orang tua siswa, alumni, atau pihak swasta untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana, hingga membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pengadaan dan rehabilitasi fasilitas sekolah (Ariani et al., 2025). Selain itu, komite sekolah juga ikut serta dalam forum musyawarah rencana kerja sekolah (Musrenbangsek) sehingga alokasi dana dan prioritas pengadaan sarana lebih tepat sasaran. Tidak hanya dalam tahap penyediaan, komite sekolah juga memiliki peran dalam menjaga dan merawat sarana/prasarana agar usia pakainya lebih panjang melalui program rutin seperti gotong royong, edukasi penggunaan fasilitas, dan pembentukan tim pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamalik yang menyatakan bahwa manajemen sekolah yang baik tidak hanya mengutamakan pembangunan baru, tetapi juga memprioritaskan pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan fasilitas yang sudah ada (PANUNTUN, 2015).

Meskipun demikian, dalam realitanya, peran komite sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa faktor seperti rendahnya kapasitas SDM komite, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan komite masih sering menjadi hambatan. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2023), yang menyatakan bahwa komite sekolah sering kali tidak dimaksimalkan perannya karena kurangnya pembinaan dan regulasi yang jelas terkait fungsi dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana komite sekolah sebenarnya dapat lebih efektif dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami dinamika peran komite sekolah dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan partisipatif. Judul ini dipilih karena adanya kesenjangan antara harapan dan realisasi peran komite sekolah dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Isu ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dinamika peran komite sekolah, diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, di mana seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber teoretis dan normatif (Tan, 2021). Subjek penelitian ditentukan sebagai komite sekolah, karena merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan, sedangkan objek penelitiannya adalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri, yang menjadi fokus utama dalam kajian ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku teks yang relevan dengan manajemen pendidikan dan partisipasi masyarakat, regulasi pemerintah terkait tugas dan fungsi komite sekolah, serta informasi tambahan dari media sosial sebagai refleksi dinamika opini publik dan kasus nyata di lapangan. Seluruh sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai konsep, peran, tantangan, dan solusi terkait keterlibatan komite sekolah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan.

Setelah data terkumpul, tahapan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui proses membaca, memahami, mengklarifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis informasi dari berbagai literatur (M. Sari & Asmendri, 2020). Analisis difokuskan pada upaya menghubungkan kerangka teori dengan norma hukum dan kebijakan yang berlaku, seperti Permendiknas No. 39 Tahun 2008 dan UU Sisdiknas, untuk mengevaluasi sejauh mana peran komite sekolah telah diimplementasikan secara efektif atau masih mengalami kendala. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan mendukung kesimpulan penelitian yang relevan dengan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, regulasi, serta pendapat ahli yang relevan, komite sekolah memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa komite sekolah atau bentuk lain kelompok masyarakat yang peduli pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Wali et al., 2020). Dengan demikian, komite sekolah bukan hanya lembaga formal semata, tetapi mitra sekolah yang aktif dalam memastikan tersedianya lingkungan belajar yang layak dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Untuk lebih memahami peran strategis komite

sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, berikut akan diuraikan beberapa aspek penting yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya:

A. Peran Komite Sekolah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Komite sekolah memiliki peran penting dan strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu fasilitas fisik maupun non-fisik yang menjadi fondasi utama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Dalam konteks ini, sarana pendidikan merujuk pada perlengkapan langsung yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, media audio visual, hingga perangkat teknologi informasi. Sementara itu, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang menunjang kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, halaman, sanitasi, listrik, air bersih, hingga jaringan internet (Cahyaningrum & Aulia, 2024). Keduanya memiliki peran tak terpisahkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa komite sekolah atau bentuk lain kelompok masyarakat yang peduli pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini menegaskan bahwa komite sekolah tidak hanya sebagai lembaga formal semata, tetapi mitra sekolah yang aktif dalam memastikan tersedianya lingkungan belajar yang layak dan mendukung proses pembelajaran yang optimal.

1. Sebagai Mitra Sekolah dalam Penggalangan Dana Tambahan

Salah satu peran utama komite sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai mitra sekolah dalam penggalangan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, terlebih lagi jika sekolah tersebut berada di wilayah tertinggal atau dengan jumlah siswa yang besar.

Dalam kondisi ini, komite sekolah dapat menginisiasi program pengumpulan dana dari berbagai sumber, seperti orang tua siswa, alumni, pihak swasta, atau donatur lainnya. Menurut (Supriyanti et al., 2024) komite sekolah harus menjadi *agent of development* yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana disebutkan dalam latar belakang penelitian ini.

Sebagai contoh, dalam kasus pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, komite sekolah bisa menjadi motor penggerak dalam upaya penggalangan dana melalui sumbangan sukarela, kerja sama dengan dunia usaha, atau kolaborasi dengan lembaga sosial. Tanpa keterlibatan aktif komite sekolah dalam aspek ini, banyak sekolah akan kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan secara cepat dan tepat sasaran.

2. Pelaku Perencanaan dan Pengawasan Proyek Pembangunan

Selain penggalangan dana, komite sekolah juga memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sekolah. Sebagai lembaga mandiri yang representatif, komite sekolah dilibatkan dalam forum Musyawarah Rencana Kerja Sekolah (Musrenbangsek) untuk menentukan prioritas pengadaan sarana/prasarana sesuai dengan kebutuhan riil sekolah (Fatmawati et al., 2020). Dengan demikian, alokasi dana dan rencana pembangunan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antar tahun anggaran. Lebih lanjut, komite sekolah membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penyimpangan anggaran atau kualitas bangunan yang tidak sesuai standar. Dalam hal ini,

komite sekolah bertindak sebagai pengawas independen yang menjembatani antara aspirasi masyarakat dan eksekusi oleh pihak sekolah atau kontraktor. Dengan adanya pengawasan dari komite, masyarakat akan lebih percaya terhadap penggunaan dana yang berasal dari mereka sendiri, baik secara sukarela maupun melalui program CSR perusahaan. Peran ini sangat relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana komite sekolah bisa menjadi solusi bagi tantangan penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang selama ini masih menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan nasional. Selain itu, peran ini juga menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kendala yang dihadapi komite sekolah dalam menjalankan fungsinya, karena melalui perencanaan dan pengawasan yang baik, potensi konflik atau duplikasi pekerjaan antara sekolah dan komite dapat diminimalkan.

3. Pemilihan Jenis dan Spesifikasi Sarana/Prasarana yang Sesuai Kebutuhan

Peran ketiga komite sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai pemilih jenis dan spesifikasi sarana/prasarana yang akan dibeli atau dibangun, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah tidak hanya terlibat dalam pengadaan fisik, tetapi juga dalam menentukan jenis, kualitas, dan spesifikasi teknis dari sarana/prasarana yang akan digunakan (A. Aziz, 2021). Misalnya, dalam pengadaan laboratorium komputer, komite sekolah bisa memberikan masukan terkait jumlah unit komputer, spesifikasi teknis, hingga jenis software yang relevan untuk digunakan dalam pembelajaran. Demikian pula dalam pengadaan meubelair, komite sekolah bisa menyarankan desain kursi dan meja yang ergonomis untuk siswa, atau dalam pembangunan toilet, komite sekolah bisa menyarankan model sanitasi yang ramah lingkungan dan mudah dirawat. Keterlibatan komite sekolah dalam tahap pemilihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang diadakan benar-benar bermanfaat bagi proses pembelajaran dan tidak menjadi barang mati akibat kurang tepatnya analisis kebutuhan. Selain itu, dengan melibatkan komite dalam tahap ini, sekolah dapat meminimalkan risiko pemborosan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana yang ada.

B. Peran Komite Sekolah dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk menjamin usia pakai serta kondisi fasilitas tetap baik sepanjang waktu. Tanpa adanya perawatan berkala, fasilitas yang sudah ada bisa cepat rusak dan menjadi tidak efektif dalam menunjang proses pembelajaran (Randan et al., 2025). Hal ini selaras dengan latar belakang penelitian ini yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, kualitas pendidikan akan sulit dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai mitra sekolah dalam menjaga keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai bentuk kegiatan pemeliharaan. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008, komite sekolah tidak hanya bertugas dalam pengadaan, tetapi juga dalam pengawasan dan pemeliharaan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Pardede & Simanjuntak, 2021). Dengan demikian, komite sekolah bukan hanya lembaga formal semata, tetapi agen aktif dalam menopang mutu layanan pendidikan melalui upaya pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan.

1. Membentuk Tim Pemeliharaan Fasilitas Sekolah

Salah satu peran utama komite sekolah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah membentuk tim pemeliharaan atau perawatan fasilitas sekolah. Tim ini biasanya terdiri dari anggota komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar yang peduli pada kondisi sekolah. Tim tersebut bekerja sama dengan pihak sekolah

untuk melakukan inspeksi rutin, membuat jadwal perawatan berkala, serta merancang program gotong royong membersihkan dan memperbaiki fasilitas yang rusak ringan. Dengan adanya tim ini, kerusakan kecil seperti genteng bocor, meja kursi rusak, atau sanitasi kurang bersih dapat segera ditangani tanpa harus menunggu anggaran besar dari pemerintah. Selain itu, tim pemeliharaan ini juga membantu menciptakan sistem pemeliharaan yang lebih terencana dan tidak reaktif, sehingga kerusakan bisa dicegah sebelum menjadi masalah besar. Menurut (Yuliani & Sari, 2024) salah satu indikator mutu sekolah adalah bagaimana fasilitas yang dimiliki terpelihara dengan baik, karena itu partisipasi aktif komite dalam aspek ini sangat signifikan dalam menopang kualitas pendidikan. Contohnya, beberapa sekolah telah berhasil mengembangkan program pemeliharaan mingguan atau bulanan di mana siswa, guru, dan orang tua ikut serta dalam kegiatan perawatan lingkungan sekolah, seperti membersihkan halaman, mengecat pagar, atau memeriksa kondisi toilet. Komite sekolah sering kali menjadi motor penggerak di balik kegiatan tersebut, dengan memberikan arahan teknis, alat, serta dukungan dana minimal untuk pelaksanaannya.

2. Meningkatkan Kesadaran dan Budaya Bertanggung Jawab melalui Edukasi

Selain membentuk tim pemeliharaan, komite sekolah juga memiliki tugas edukatif yang penting dalam meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan masyarakat sekitar dalam menjaga fasilitas sekolah. Melalui sosialisasi, kampanye, atau kegiatan lingkungan, komite sekolah dapat menciptakan budaya tertib dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan merawat fasilitas sekolah (Hamidah et al., 2024). Misalnya, komite sekolah dapat menginisiasi program “Aku Sayang Sekolahku” yang berisi ajakan kepada siswa untuk tidak merusak meja, tidak mencoret-coret dinding, atau menjaga kebersihan ruang kelas. Program ini bisa dikemas dalam bentuk lomba dekorasi kelas, pemasangan poster edukasi, hingga seminar singkat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Dengan cara ini, komite sekolah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan mereka sendiri. Budaya ini juga bisa diperluas hingga ke masyarakat sekitar, agar fasilitas sekolah tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak luar, seperti parkir liar di halaman sekolah atau pemanfaatan gedung untuk acara non-pendidikan tanpa izin. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka risiko kerusakan fasilitas akibat kelalaian atau penyalahgunaan dapat diminimalkan secara signifikan.

3. Merancang Program Pemeliharaan Berkelanjutan dengan Partisipasi Multi-Pihak

Komite sekolah juga bisa merancang program pemeliharaan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk alumni, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Contoh nyata dari inisiatif ini adalah program “*Adopt a School*” di mana suatu perusahaan atau instansi mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan gedung sekolah dalam periode tertentu. Program ini tidak hanya membantu dalam segi biaya, tetapi juga meningkatkan hubungan sekolah dengan dunia usaha dan menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Melalui program-program semacam ini, komite sekolah bisa membangun jejaring kerja sama yang luas, sehingga pemeliharaan sarana/prasarana tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran sekolah atau pemerintah daerah. Ini juga sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa komite sekolah memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan (Siregar, 2020). Program pemeliharaan berkelanjutan juga bisa dirancang dalam bentuk *maintenance fund*, yaitu dana khusus yang dikumpulkan secara berkala dari sumbangan sukarela masyarakat atau hasil dari program ekonomi produktif di sekolah, seperti kantin sekolah atau unit produksi SMK. Dana ini kemudian dialokasikan secara transparan untuk

biaya pemeliharaan tahunan, sehingga tidak ada lagi situasi di mana sekolah harus menunda perawatan karena keterbatasan anggaran mendadak.

C. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Peran Komite Sekolah

Meskipun memiliki potensi besar sebagai mitra strategis sekolah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan, dalam praktiknya, peran komite sekolah masih menghadapi berbagai kendala yang membuat fungsinya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil analisis literatur dan telaah terhadap berbagai studi kasus, tantangan utama yang dihadapi oleh komite sekolah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: (1) kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) komite, (2) lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan komite, dan (3) keterbatasan dana serta minimnya partisipasi masyarakat (M. A. Aziz, 2025). Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat signifikan dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat.

1. Kurangnya Kapasitas SDM Komite Sekolah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan peran komite sekolah adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang menjadi anggota komite. Banyak dari mereka belum memahami secara mendalam tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai mitra sekolah. Hal ini menyebabkan fungsi komite sering kali tidak maksimal, bahkan cenderung pasif dan hanya menjadi formalitas saja tanpa kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Menurut (Penyusun, 2015), salah satu syarat penting dalam manajemen berbasis sekolah adalah adanya partisipasi masyarakat yang aktif dan profesional. Sayangnya, banyak komite sekolah yang dibentuk tanpa seleksi atau pembekalan yang memadai bagi anggotanya. Akibatnya, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur pengadaan barang/jasa, mekanisme musyawarah rencana kerja, maupun teknis pengawasan proyek infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan komite lebih bersifat simbolis daripada substantif. Kondisi ini selaras dengan latar belakang penelitian ini, yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa adanya kapasitas yang memadai pada komite sekolah, maka potensi partisipasi masyarakat tidak akan tersalurkan secara optimal, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan sulit dicapai.

2. Lemahnya Koordinasi antara Sekolah dan Komite Sekolah

Faktor kedua yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran komite sekolah adalah lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan komite sekolah. Dalam banyak kasus, hubungan antara kepala sekolah dan komite sekolah belum dibangun secara harmonis dan profesional, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas, duplikasi pekerjaan, atau bahkan konflik kepentingan. Sebagai contoh, ketika sekolah mengajukan rencana pembangunan ruang kelas baru, tetapi komite sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan awal, maka muncul ketidakpahaman mengenai urgensi dan sumber pendanaan proyek tersebut. Akibatnya, partisipasi komite dalam proses pengadaan maupun pengawasan menjadi tidak maksimal. Menurut (Wandi & Rifa'i, 2020), hubungan yang sehat antara sekolah dan komite harus didasarkan atas prinsip saling percaya, transparansi, dan kesetaraan, bukan hubungan hierarkis atau dominatif. Selain itu, lemahnya koordinasi juga menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat atau CSR perusahaan. Jika tidak ada mekanisme kontrol dan pelaporan yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap komite bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada minat masyarakat untuk ikut serta dalam program sekolah.

3. Keterbatasan Dana dan Minimnya Partisipasi Masyarakat

Faktor ketiga yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan peran komite sekolah adalah keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terluar. Meskipun komite sekolah memiliki potensi besar dalam penggalangan dana tambahan untuk membiayai pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan, namun jika partisipasi masyarakat rendah, maka upaya tersebut akan sulit berhasil.

Menurut (Khorofi & Winata, 2023), salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Namun, dalam realitanya, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di pundak pemerintah, sehingga partisipasi mereka terbatas pada kewajiban administratif seperti membayar iuran sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif tentang pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan sekitar. Program-program seperti seminar pendidikan, pertemuan wali murid, atau kampanye media sosial bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, komite sekolah juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar masyarakat merasa yakin dan bersedia untuk turut serta dalam upaya pengembangan sekolah.

D. Solusi untuk Mengoptimalkan Peran Komite Sekolah Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, beberapa solusi konkret dapat diterapkan:

1. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan Berkelanjutan kepada Anggota Komite Sekolah
Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas SDM komite sekolah adalah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala. Materi pelatihan bisa mencakup manajemen sekolah, pengelolaan dana partisipatif, pengadaan barang/jasa, serta teknik komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pihak sekolah. Menurut (Suwandi, 2016), pembinaan ini sebaiknya dilakukan oleh dinas pendidikan setempat atau lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keahlian di bidang manajemen pendidikan.
2. Penguatan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi antara Sekolah dan Komite
Untuk mencegah duplikasi pekerjaan dan meningkatkan sinergi, perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih intensif dan transparan antara sekolah dan komite. Forum Musyawarah Rencana Kerja Sekolah (Musrenbangsek) bisa dimanfaatkan sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, menetapkan prioritas pengadaan sarana/prasarana, dan memastikan partisipasi aktif komite dalam setiap tahap pelaksanaan program.
3. Penegakan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana
Agar partisipasi masyarakat meningkat, komite sekolah harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Laporan berkala, rapat evaluasi, dan publikasi alokasi dana secara terbuka dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat (V. K. Sari & Widyawati, 2021). Sebagaimana disebutkan dalam abstrak penelitian ini, komite sekolah memiliki peran strategis dalam pengadaan sarana/prasarana, tetapi peran tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh sistem pengelolaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Komite sekolah memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan sebagai upaya mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite berperan aktif dalam penggalangan dana dari masyarakat, perencanaan prioritas pengadaan, pengawasan pelaksanaan proyek, serta

pemilihan jenis dan spesifikasi sarana/prasarana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya keterlibatan komite, penyediaan fasilitas pendidikan dapat dilakukan secara lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil sekolah tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Namun, dalam praktiknya, peran komite sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kurangnya kapasitas SDM komite menyebabkan fungsi mereka sering kali tidak maksimal. Lemahnya koordinasi antara sekolah dan komite mengakibatkan tumpang tindih tugas dan minimnya akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, menjadi hambatan besar dalam upaya membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat utama dalam optimalisasi peran komite sekolah. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan solusi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Pemberian pembinaan dan pelatihan kepada anggota komite sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Penguatan mekanisme koordinasi antara sekolah dan komite harus dibangun melalui forum musyawarah rencana kerja sekolah (*Musrenbangsek*) agar setiap program dirancang secara partisipatif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus ditegakkan guna membangun kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, komite sekolah dapat benar-benar menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ariani, A., Pangestu, S. A., & Nurfuadi, N. (2025). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MUTU DI SMK. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 117–131. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/manajerial/article/view/4894>
- Aziz, A. (2021). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Aset di SMK Ma'arif 9 Kebumen. *Arfannur*, 2(1), 19–34. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/arfannur/article/view/271>
- Aziz, M. A. (2025). Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan | E-ISSN: 3062-7788*, 2(1), 138–143. <https://jurnal.kopusingdo.com/index.php/jimp/article/view/756>
- Badrudin, B., Setiana, R., Fauziyyah, S., & Ramdani, S. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1797–1808. <http://www.jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3962>
- Cahyaningrum, A., & Aulia, S. N. (2024). MANAJEMEN SARPRAS DI SMP/MTS DAN SMPLB. *Egitim: Jurnal Pendidikan*, 14(30), 1–29. <http://idnriset.com/index.php/egitim/article/view/3>
- Fatmawati, F., Hasbi, H., & Nurdin, K. (2020). Dampak Implementasi Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS Terhadap Profesionalitas Guru SMP Negeri di Palopo. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(3), 369–383. <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/53>
- Hamidah, F., Rosidin, L., Nathania, N., & Fitri, R. (2024). Analisis Penerapan Program Sekolah Sehat dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan di SDN Kebon Jeruk 08. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 2232–2247. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/14871>
- Hidayat, U. F., Pasaribu, M. M., Rantung, D. A., & Boiliu, N. I. (2023). Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Adaptif dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Pendidikan. *Journal on Education*, 5(2), 3492–3506. <https://www.academia.edu/download/100598462/817.pdf>
- Indrayeni, I. D. Y. (2024). MANAJEMEN KEGLATAN EKSTRAKURIKULER DALAM

- MENINGKATKAN MUTU MADRASAH DI MTs MUHAMMADIYAH 02 PEKANBARU. UIN Suska Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/76976/>
- Irayanti, I., & Komalasari, K. (2023). Membangun Etika Kewarganegaraan Global Melalui Karakter Moral Pancasila: Analisis Konseptual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 21–34. <https://pdfs.semanticscholar.org/50bd/8e6a5a8bf59cf65d20658718df10d8b4588b.pdf>
- Khorofi, M., & Winata, E. B. (2023). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KB BAITAL HAMDY SAMPANG. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/7552>
- PANUNTUN, S. (2015). *Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Al-Iryad Gajah Demak*. Masters thesis, UIN Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/7506/1/125112051_awal.pdf
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 893–904. <https://core.ac.uk/download/pdf/490608324.pdf>
- Penyusun, T. (2015). Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. https://www.academia.edu/download/79495495/18._KKN_ABCD.pdf
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(2). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authType=crawler&jrnl=29624738&AN=183511841&h=nJesk5wDD8Kq3WEGjQrPaOztOu57r3KherJJRpeT'Z59exL3g2yo%2BNgTMoUWbfRKjVsTX5a8oARX7oItpwN%2Byeg%3D%3D&crl=c>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4108>
- Siregar, G. G. S. (2020). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan kinerja guru terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di MAN Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(2), 215–228. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/4928>
- Supriyanti, Y., Rohyadi, E., & Riansi, E. S. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 179–189. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/20365>
- Suwandi, S. (2016). Analisis studi kebijakan pengelolaan guru SMK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan UNY*, 23(1), 90–100. <https://www.neliti.com/publications/164028/analisis-studi-kebijakan-pengelolaan-guru-smk-dalam-rangka-peningkatan-mutu-pend>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Utama, R. E. (2020). Strategi pembiayaan pesantren melalui pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 117–134. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Tahdzibi/article/view/7878>

- Wali, F., Rosyidi, I., & Hakim, A. A. (2020). Implementasi Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Halimahera Selatan. *Khairun Law Review*, 1(1). <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/lawreview/article/view/3219>
- Wandi, W., & Rifa'i, A. (2020). Reinventing Hubungan Birokrasi dan Politik dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Berkeadilan di Indonesia: Suatu Kajian. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 106–112. <https://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas/article/view/156>
- Yuliani, E., & Sari, D. I. P. (2024). HUBUNGAN FASILITAS KESEHATAN DENGAN MUTU PELAYANAN DI PUSKESMAS AIR PUTIH SAMARINDA. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(8). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkug/article/view/672>